

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Sejalan dengan perkembangan ekonomi,teknologi informasi,sosial dan politik,perlu disadari pula bahwa mutu pendidikan bagi pelajar harus lebih ditingkatkan lagi.Terutama mahasiswa sebagai salah satu elemen Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu berpikir kritis, tegas, dan kreatif khususnya dibidang yang mereka pilih.Hal ini sangat penting karena sebagai generasi muda penerus bangsa mahasiswa sangat diharapkan mampu untuk menjadi motor penggerak dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini.

Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang mampu mengembangkan,menambah ilmu serta mengaplikasiannya di dunia kerja,maka diadakan suatu kegiatan yang telah disusun dengan kurikulum sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan yaitu dengan mengikuti dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Hal ini bertujuan untuk menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat mengenal secara langsung dunia kerja yang sebenarnya sehingga mahasiswa nantinya mengerti bagaimana dunia kerja berbeda dengan dunia pendidikan.

Di dunia pendidikan mahasiswa belajar dengan teori-teori sedangkan di dunia kerja mahasiswa mempraktekkan teori yang di dapat semasa di perkuliahan.

Universitas Sumatera Utara sebagai Lembaga Pendidikan formal akan melahirkan lulusan yang akan terjun langsung ke dunia nyata untuk meningkatkan kualitas para lulusannya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara, mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dimana setiap mahasiswa melakukan PKLM langsung di suatu lembaga, instansi, maupun perusahaan.

PKLM merupakan syarat yang harus dilewati maupun dilakukan setiap mahasiswa program studi D-III Administrasi Perpajakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Adapun yang menjadi latar belakang dilaksanakannya PKLM ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa di lapangan secara langsung. Dengan adanya kurikulum PKLM ini adalah merupakan langkah mahasiswa untuk menulis Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya di Program Studi D-III Administrasi Perpajakan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas. Peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya.

Untuk itu peran dan dukungan serta partisipasi masyarakat sangatlah penting,hal ini memerlukan adanya pemahaman terhadap pengetahuan tentang perpajakan.

Keputusan Dirjen Pajak no. 69 th. 2007, pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (2) secara gamblang menjelaskan bahwa SKF (Surat Keterangan Fiskal) adalah bagian dari persyaratan Administrasi penawaran selain yang tertera dalam kepres 80 tahun 2003. Dalam kondisi tertentu seperti dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seringkali disebutkan adanya persyaratan bahwa calon penyedia barang/jasa harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak tertentu (peserta tender).

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan proses yang harus di ikuti oleh wajib pajak yang ingin melakukan proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah tersebut.

Hal inilah yang menjadi acuan dan dasar pemikiran penulis untuk mencoba meneliti dan membahas untuk menuangkan dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul :

“ Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kepada Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia “.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Secara teoritis Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dengan cara praktis di lapangan yang langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah :

- 1.1 Untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
- 1.2 Untuk mengetahui masalah maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
- 1.3 Untuk mengusulkan penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam rangka peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang Surat Keterangan Fiskal.
- b. Meningkatkan interaksi baik dengan petugas ataupun pegawai pajak maupun dengan Wajib Pajak mengenai Surat Keterangan Fiskal.
- c. Menambah ilmu dan wawasan tentang kegunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- d. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

- a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fisip USU.
- b. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, mahasiswa dituntut memberikan sumbangsuhnya baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

c. Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahan.

A. Dapat memperkenalkan serta mempromosikan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi perpajakan.

B. Mempromosikan *image* KPP Pratama Medan Polonia kepada Wajib Pajak (WP) baik yang terdaftar maupun yg tidak terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

2.3 Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara

a. Meningkatkan hubungan kerja sama Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

b. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen dan instansi pemerintah di bangku perkuliahan.

c. Mendapat masukan dari Kantor Pelayanan Pajak Polonia berupa ide, saran, dan gagasan menyangkut penanganan masalah perpajakan serta penyempurnaan kurikulum sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

- d. Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta menetapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu, khususnya dibidang perpajakan.
- e. Membangun pencitraan yang baik terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional, khususnya Universitas Sumatera Utara.

C.Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

Beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1.1 Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Mardiasmo, 2006 : 1)

1.2 Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(Waluyo, 2003 : 4)

1.3 Dr.N.J.Feldman.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada pengusaha oleh pihak yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

(Resmi, 2003:1)

2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 2 UU KUP).

3. Jenis Pajak

3.1 Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

3.2 Menurut Sifatnya Pajak

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi (Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Kabupaten dan Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan).

4. Sistem Pemungutan Pajak

4.1 *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4.2 *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4.3 *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo,2009 : 2)

5. Pengertian Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

6. Kegunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Bagi Wajib Pajak, Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah.

D. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Penulis ingin mengetahui beberapa masalah berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui data tentang Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui masalah maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan

Pada tahapan ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari penentuan judul, , penentuan tempat PKLM , pengajuan judul, pengesahan judul, mencari bahan untuk pembuatan proposal dan juga konsultasi dengan dosen.

2. Studi Literatur

Dalam hal ini penulis mengumpulkan alat-alat dan bahan yang mendukung laporan ini menyangkut masalah perpajakan dan yang dibutuhkan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah,

catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

3. Observasi Lapangan

Melakukan peninjauan dan pengamatan yang sesuai dengan data-data yang ada pada instansi bersangkutan mengenai judul dari PKLM ini.

4. Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data baik data primer (data yang bersumber dari pihak yang ahli d bidang / pihak yang berkaitan) dan data sekunder (yang bersumber dari referensi lain seperti *Browsing* di internet).

5. Analisis dan Evaluasi Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan,penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data-data dan kemudian akan di presentasikan secara objektif,jelas dan sistematis.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (Library Research)

Pengumpulan data mengenai tata cara pemberian surat keterangan Fiskal seperti buku-buku, majalah , dan Undang-undang.

2. Daftar Wawancara (*Interview Guide*)

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi tentang Surat Keterangan Fiskal ini.

3. Data Observasi (*Observation Guide*)

Melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas.

4. Daftar Dokumentasi (*Optional Guide*)

Dengan mengumpulkan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan Surat Keterangan Fiskal pada arsip yang telah ada dan di anggap sah sebagai bukti otentik.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktek Lapangan Mandiri

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan laporan PKLM ini, maka penulis membaginya dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, Uraian Teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat lokasi dimana Praktik Kerja Lapangan Mandiri dilakukan. Dalam hal ini sejarah singkat lokasi yang akan diuraikan penulis adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi pegawai di instansi tersebut serta gambaran lain jika dibutuhkan.

BAB III: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ATAS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT KETERANGAN FISKAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana prosedur dan tata cara penyampaian surat keterangan fiskal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI

Dalam bab ini Penulis akan menganalisa data yang diperoleh, kemudian mengadakan evaluasi data yang telah diterima selama proses Praktik Kerja Lapangan Mandiri serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN